



SYARIF THAYEB DAN GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA PADA DUA ZAMAN (1964-1978)

Muhammad Viky Nugraha

*Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
nugrahamviky@gmail.com*

To cite this article: Nugraha, M. V. (2023). Syarif Thayeb dan gerakan mahasiswa di indonesia pada dua zaman (1964-1978). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(1), 23-32. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i1.23344>.

Abstract

he main problem in this research is about the contribution of Syarif Thayeb to the student movement. To describe the main problems in this research, researchers limit the focus of the study into four questions, such as 1) Background of Syarif Thayeb's life. 2) What is the role of Syarif Thayeb in the student movement during the Old Order. 3) How was Sharif Thayeb's effort to suppress the student movement during the New Order. 4) How does his policy make an impact on students This research uses a historical method which consists of four steps of research: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study can be explained that Syarif Thayeb was elected as the Minister of PTIP and Minister of P and K because of his track record in academia as Chancellor of the University of Indonesia. During his leadership in the Sukarno era, Syarif Tahyeb was very close to students and was one of the initiators of the formation of the Indonesian Student Action Unit (KAMI). Syarif Thayeb, who was a military, felt moved to overthrow the PKI which at that time was considered to have killed military leaders and KAMI who was the actor of the demonstration to disband the PKI. At the time of being appointed Minister of P and K of the new order Syarif Thayeb had a tough task to reduce the student movement which was increase due to the Malari action. Syarif Thayeb finally issued policies which contained restrictions on student movements, even though the policies were reaping opposition from students.

Abstrak

Masalah utama dalam skripsi ini ialah bagaimana kontribusi Syarif Thayeb terhadap gerakan mahasiswa. Untuk menjabarkan masalah utama dalam skripsi ini, peneliti membatasi fokus kajian ke dalam empat pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana latar belakang kehidupan Syarif Thayeb. 2) Bagaimana Peran Syarif Thayeb dalam gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama. 3) Bagaimana upaya Syarif Thayeb dalam menekan gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru. Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian historis yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Syarif Thayeb terpilih menjadi Menteri PTIP dan Menteri P dan K karena rekam jejaknya di bidang akademik sebagai Rektor Universitas Indonesia. Saat kepemimpinannya di masa Soekarno Syarif Tahyeb sangat dekat dengan mahasiswa dan merupakan salah satu inisiator terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Syarif Thayeb yang merupakan seorang militer merasa tergerak untuk menggulingkan PKI yang pada masa tersebut dianggap membunuh para pimpinan militer dan KAMI yang merupakan aktor dari demonstrasi untuk membubarkan PKI. Pada saat diangkat menjadi Menteri P dan K masa Orde Baru Syarif Thayeb memiliki tugas yang berat yaitu meredam aksi mahasiswa yang bergejolak akibat aksi Malari. Syarif Thayeb akhirnya membuat kebijakan-kebijakan yang isinya membatasi gerak mahasiswa, walaupun kebijakan tersebut menuai penolakan dari para mahasiswa.

Article Info

Article History:
Received 14 Jun 2022
Revised 16 Desember 2022
Accepted 28 Januari 2023
Available online 1 April 2023

Keyword:

Syarif Thayeb,
Student Movement,
Old Order ,
New Order

PENDAHULUAN

Golongan muda sangat berperan dalam sejarah Indonesia. Kondisi golongan muda yang membawa semangat dan ide-ide merupakan keunggulan para golongan muda. Golongan muda adalah mereka yang sedang berumur dibawah 30 tahun. Para golongan muda ini mendapatkan peranan penting pada saat kondisi tertentu. Kondisi tersebut ialah pada saat perang dan revolusi dimana semangat dan tenaga fisik pemuda diperlukan. Disaat-saat seperti itu, masyarakat biasanya baru membicarakan dan mengidealisir pemuda (Farawita, 2018; Saidi, 1989).

Mahasiswa yang termasuk dalam golongan muda pun melakukan perannya. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat berpendidikan yang sehari-hari bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya (Akbar, 2016; Muslim, 2020). Peranan mahasiswa dari dulu hingga sekarang adalah kontrol sosial, maka wajar apabila mahasiswa seringkali melakukan pergerakan karena itu adalah salah satu peran mahasiswa. Selain karena perannya menjadi kontrol sosial mahasiswa pun melakukan beberapa aksi dikarenakan mereka kurang puas dengan pemerintah, seperti aksi tahun 1966 mahasiswa tidak puas dengan keadaan ekonomi dan politik pada masa itu dan gerakan Malari pun dengan alasan yang hampir sama. Akibat dari gerakan-gerakan mahasiswa tersebut seringkali membuat kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan kampus dan mahasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pergerakan mahasiswa sudah berlangsung beberapa kali dalam sejarah Indonesia. Beberapa tokoh terlibat dalam beberapa pergerakan mahasiswa dapat dikatakan menjadi tokoh besar di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bahwa pergerakan mahasiswa sudah ada dari sejak masa kolonial Belanda. Kegiatan mahasiswa tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan mahasiswa yang sedang berkuliah di luar negeri pun ikut melakukan kontribusi

untuk Indonesia. Peristiwa kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah pun tidak lepas dari usaha para mahasiswa pada zaman itu.

Setelah Indonesia merdeka tidak lantas menurunkan pergerakan mahasiswa. Mahasiswa yang merasa memiliki tanggung jawab sosial sering kali melakukan kritik-kritik tajam terhadap pemerintahan puncaknya adalah aksi demo mahasiswa pada tahun 1966. Peristiwa aksi mahasiswa pada tahun 1966 merupakan salah satu bentuk gerakan mahasiswa yang sangat besar. Gerakan mahasiswa pada tahun ini dikordinir oleh mahasiswa dalam sebuah kelompok yang bernama KAMI atau kesatuan aksi mahasiswa Indonesia. Menurut Sitompul (2008, hlm. 49). KAMI dideklarasikan pada 25 Oktober 1965 yang disahkan oleh Menteri perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Anggota KAMI adalah Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan sebagian dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan organisasi-organisasi mahasiswa ini adalah penentang dari komunisme. Dalam melaksanakan aksi KAMI selalu berkomunikasi dengan Menteri PTIP yang saat itu yang dipegang oleh Syarif Thayeb,

Peristiwa aksi tahun 1966 ini diakibatkan oleh keadaan Indonesia yang sangat terpuruk karena adanya peristiwa Gestapu selain itu banyak faktor lain yang menyebabkan masyarakat ingin adanya perubahan salah satunya masalah ekonomi. Pada aksi tahun 1966 ini KAMI mengumandangkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), pertama bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, kedua perombakan kabinet Dwikora, ketiga turunkan harga (Sitompul, 2008, hlm. 80). Sebuah aksi yang besar pun terjadi pada 15 Januari 1966 di Bogor dimana sekitar mahasiswa yang jumlahnya sekitar 200-400 kendaraan bentrok dengan resimen cackrabirawa dimana di dalam istana sendiri

Soekarno sedang melakukan rapat kabinet. Aksi mahasiswa pun sedikit mereda karena ada instruksi dari Sjarif Thayeb untuk para mahasiswa kembali berkuliah, namun akhirnya mahasiswa masih tetap giat melakukan aksi dan mogok kuliah (Raillon, 1985).

Pada 25 Februari 1966 terbitlah Keputusan Presiden No. 42/Kogam/1966 yang membubarkan KAMI dan melarang mahasiswa berkumpul lebih dari lima orang (Sitompul, 2007). Keluarnya keputusan Presiden tersebut merupakan keresahan dari Presiden dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Terbitnya Keluarnya Surat Sebelas Maret (Supersemar) yang menandai lahirnya Orde Baru merupakan andil dari aksi mahasiswa 1966. Mahasiswa yang mengikuti aksi ini pun akhirnya diberinama angkatan 66. Para aktivis dar angkatan 66 pun akhirnya banyak yang bergabung dengan badan legislative negara.

Pada masa Orde Baru mahasiswa masih menunjukkan pergerakannya. Aksi yang terjadi diantaranya yaitu aksi anti korupsi, anti pembangunan Taman Mini, aksi golput pada pemilu 1971, dan puncaknya adalah peristiwa Malari. Aksi yang sangat dikenal pada masa Orde Baru ini yaitu peristiwa 15 Januari atau yang lebih dikenal peristiwa Malari. Kehadiran Kakuei Tanaka yang merupakan Perdana Menteri Jepang di Jakarta pada tanggal 14 Januari merupakan puncak dari peristiwa Malari. Mahasiswa sudah berkumpul di oangkalan udara Halim Perdanakusuma dengan rencana menyambut kedatangan perdana menteri tersebut. Namun, aparat keamanan sudah sudah bersiap untuk menjaga mahasiswa yang ingin menerobos masuk pangkalan. Keadaan yang mencekam di Jakarta mengakibatkan perdana menteri tersebut harus menggunakan helikopter.

Banyak sekali faktor lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa Malari ini seperti persaingan dalm diri abri dan adanya pertikaian antara pemerintah dan umat islam. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ricklefs (2007) pertikaian tersebut memunculkan

nama Ali Murtopo yang dianggap sebagai tokoh pemerintahan yang anti Islam pada saat ali mendukung ide mengenai undang-undang pernikahan baru yang mengizinkan wanita muslim menikah dengan seseorang non muslim. Masalah tersebut direspon dengan diserbunya gedung parlemen oleh mahasiswa muslim. Para demonstran meminta agar pemerintah segera menarik kembali rancangan undang-undang tersebut.

Setelah peristiwa Malari ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang isinya menekan mahasiswa untuk mengurangi kegiatan berorganisasi salah satu caranya adalah dengan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan mahasiswa minta izin kepada rektor apabila hendak melaksanakan kegiatan (Noor Choliz, 2011). Kelompok organisasi ekstra kampus setelah peristiwa Malari ini harus masuk dalam KNPI.

Kebijakan-kebijakan tersebut banyak dikeluarkan oleh Syarif Thayeb selaku Menteri P dan K yang menggantikan Prof Soemantri Bojonegoro. Sjarif Thayeb pun lansung dibekali instruksi Presiden untuk segera menormalkan kembali kehidupan universitas dan kehidupan mahasiswa secepatnya (Naredi, 2019; Rum Aly, 2004) Syarif Thayeb yang sebelumnya dirasa dekat dengan mahasiswa dengan memelopori terbentuknya KAMI dan kedekatan dengan angkatan'66 mendapat tugas berat untuk menentramkan situasi kampus akibat guncangan peristiwa Malari.

Syarif Thayeb sendiri memang tidak bisa lepas dari mahasiswa selama dia menjabat di pemerintahan. Sjarif Thajeb ditunjuk pertama kali untuk menjabat dipemerintahan yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan menjabat sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada Kabinet Dwikora. Pada masa inilah Tharif Thajeb sangat akrab dengan "angkatan 66" yang melakukan aksi pada tahun tersebut.

Setelah pemerintahan Soekarno runtuh dan munculah Orde Baru Syarif Thayeb kembali

harus berurusan dengan mahasiswa dengan terpilihnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1974 setelah sebelumnya dia menjabat sebagai Duta Besar RI untuk AS (Septiana, 2016). Sepak terjang Syarif Thayeb yang selalu bergelut dengan Mahasiswa menjadi ketertarikan untuk diteliti. Hal ini memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk mengkaji tentang Syarif Thayeb Dan Gerakan Mahasiswa Indonesia Pada Dua Zaman (1964-1978).

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode historis. Metode historis ialah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008, hlm. 39; Maman, 2018). Disamping itu menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 14) metode historis merupakan sebuah proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Dalam menulis artikel ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi (Darmawan & Mulyana, 2019).

Langkah awal penelitian penelitian yaitu heuristik atau mengumpulkan data. Heuristik ialah mencari sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah maupun evidensi sejarah. Sumber-sumber yang dicari merupakan sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada studi literatur. Penulis melakukan heuristik mencari berbagai sumber ke beberapa tempat diantaranya: Perpustakaan UPI, Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan Nasional, dan toko-toko buku.

Tahapan berikutnya adalah kritik. Kritik Sumber ialah tahapan kedua yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahapan ini sumber-sumber yang telah didapatkan oleh peneliti akan menyaring informasi tersebut secara kritis agar mendapatkan fakta yang dibutuhkan. Ada dua proses dalam melakukan kritik

sumber yaitu melakukan kritik secara eksternal dan internal. Pada kritik eksternal, peneliti menguji sumber-sumber literatur dengan cara membandingkan sumber satu sama lainnya. Dan pada kritik internal, peneliti menganalisis isi dari sumber tersebut relevan atau tidak dengan permasalahan penelitian.

Selanjutnya ialah Interpretasi ialah tahap menafsirkan berbagai macam fakta-fakta yang telah didapatkan dan sebelumnya telah melewati tahap kritik. Pada tahapan ini peneliti berusaha menafsirkan setiap sumber yang berkaitan dengan Syarif Thayeb Dan Gerakan Mahasiswa Indonesia Pada Dua Zaman 1964-1978.

Historiografi ialah tahapan terakhir. Pada tahap ini peneliti menyajikan berbagai macam fakta yang sebelumnya telah diinterpretasi oleh peneliti menjadi sebuah karya ilmiah yang sesuai kaidah ilmiah. Sehingga dihasilkan suatu penulisan yang logis dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh menjadi suatu karya tulis ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN

Syarif Thayeb merupakan seorang Menteri yang pernah menjabat di dua era kepemimpinan, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto. Dalam dua pemerintahan ini Syarif Thayeb memegang jabatan dibidang yang sama yaitu pendidikan dimana pada pemerintahan Soekarno memegang jabatan sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, sedangkan masa pemerintahan Soeharto memegang jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Syarif Thayeb merupakan anak dari seorang Uleebalang di Kota Pereula yang bernama Teuku Cik Muhammad Thajeb, maka Sjarif Shajeb memiliki gelar Teuku dari sang ayah. Teuku Muhammad Syarif Thayeb lahir pada 7 Agustus 1920 di Peureulak, Aceh.

Pada tahun 1933 Syarif Thayeb memulai sekolahnya di Geneeskundige Hogeschool dan lulus pada 1938. Geneeskundige Hogeschool merupakan sekolah kedokteran yang memiliki

sejarah panjang. Pertama kali dibuka pada tahun 1851 untuk memenuhi kebutuhan dokter cacar dan menghasilkan lulusan yang disebut dengan dokter jawa maka sekolah tersebut disebut sekolah dokter jawa. Pada tahun 1902 terjadilah reorganisasi dan berubah nama menjadi *School Ter Opleiding Van Indische Artsen* (STOVIA). Barulah pada 1927 STOVIA berubah nama menjadi *Geneeskundige Hogeschool* (GHS) (Djumhur dan Danasuparta, 1976, hlm. 145). Syarif Thayeb meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi Kedokteran yang bernama *Ikadai Gakko Call College* di Jakarta pada tahun 1945. Setelah selesai menyelesaikan studinya di Ikadai Gakko Call College dilanjutkan pendidikannya pada 1955 di Harvard Medical School Amerika. Lulus dari Harvard pada 1957 Syarif Thayeb melanjutkan Studinya di Pediatrics School of Medicine di Philadelphia.

Setelah menyelesaikan studinya di Amerika kembali ke Indonesia dan berkerja sebagai kepala bank dan laboratorium darah angkatan darat. Dunia militer bukanlah hal yang asing bagi Syarif Thayeb dimana semasa masih sekolah ia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan setelah kemerdekaan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) (Asnan, dkk, 2018). Mempunyai latar belakang kedokteran menepatkannya menjadi tim medis yang bertugas dalam penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dan penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS). Tahun 1955 bekerja sebagai dokter militer Komando Militer Jakarta Divisi Siliwangi. Dalam memperdalam bidang militer Syarif Thayeb pernah mengikuti pendidikan militer di Sekolah Staf Angkatan Darat (Seskoad) Bandung pada tahun 1970.

Awal karir Syarif Thayeb di bidang pendidikan dimulai pada saat menjadi dosen senior pada Fakultas Kedokteran Bagian Anak Universitas Indonesia, pada saat yang bersamaan Syarif Thayeb mengemban jabatan sebagai Kepala Rumah Sakit Umum (RSUP), yang saat ini bernama Rumah Sakit Cipto

Mangunkusumo (Sumardi, dkk, 1984, hlm 56). Satu tahun berikutnya diangkat menjadi Presiden atau Rektor Universitas Indonesia sampai tahun 1964. Kiprah dalam pemerintahan dimulai ketika tahun 1964 dilantik oleh Soekarno sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada kabinet Dwikora sampai tahun 1966 (Septiana, 2016).

Pada masa akhir pemerintahan Soekarno ini kondisi Indonesia sangatlah tidak baik dimana terjadi peristiwa pada tahun 1 Oktober 1965 merupakan sebuah peristiwa berdarah yang menguncang Indonesia. Satu Batalyon pengawal presiden yang dipimpin oleh Kolonel Untung berangkat dari pangkalan udara Halim dengan tujuan menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Dalih dari penculikan tersebut adalah untuk menghancurkan Dewan Jenderal (Ahmad & Suwirta, 2007). Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu juga sedang dalam masa yang tidak baik. Inflasi yang sangat tinggi mengakibatkan kenaikan harga-harga barang naik sekitar 500%. Harga beras pada akhir tahun dikabarkan naik sebesar 900% dan harga tukar rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp 5.100 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500 dan kembali naik menjadi Rp 50.000 (Ricklefs, 2007). Mahasiswa pada saat itu merasa sudah tidak kuat hidup karena naiknya harga-harga. Mereka menafsirkan bahwa kenaikan harga-harga merupakan unsur politik dari para menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari pengganyangan Gestapu mundur (Gie, 2011). Kekacauan kondisi Indonesia tersebut yang menyebabkan mahasiswa melancarkan aksi pada 1966.

Aksi mahasiswa pada tahun 1966 ini sangatlah terorganisir karena adanya sebuah kelompok yang merangkul seluruh mahasiswa yang dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kelompok ini terbentuk pada saat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan yaitu Syarif Thayeb menggumpulkan para tokoh mahasiswa nonkomunis dirumahnya. Usulan membentuk sebuah organisasi akhirnya disepakati oleh

seluruh seluruh yang hadir maka terbentuklah KAMI (Saidi, 1989). Keputusan mahasiswa untuk membentuk KAMI merupakan keputusan yang sangat berani karena KAMI sendiri tidak didukung secara formal oleh militer, maka bila militer nantinya berpihak kepada Presiden maka organisasi ini kan dengan mudah runtuh. Pada kenyataannya KAMI diam-diam didukung oleh pihak militer yang selalu melindungi mereka dari serangan elemen tentara dan kekuatan politik yang memusuhi mereka (Ali, 1985).

Pada 9 Januari 1966 diadakan pertemuan KAMI dan bersepakat untuk mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden Soekarno. Rumusan tuntutan tersebut dirumuskan oleh tiga orang wakil KAMI Pusat yaitu Nazaruddin Nasution (HMI), Ismid Hadad (Ikatan Pers Mahasiswa), dan Saverinus Suwardi (PMKRI) (Purwoko dkk. 2010). Ketiga orang tersebut berhasil membuat sebuah rumusan tuntutan yang akhirnya dikenal dengan nama Tritura. Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) sendiri mulai dikumandangkan pada tanggal 10 Januari 1966 maka hari itu disebut sebagai hari Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Pada hari Senin ini kegiatan awal mahasiswa adalah adanya seminar ekonomi dan rapat akbar yang dilaksanakan di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sidang ini sendiri dihadiri oleh Sarwo Edhi yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pasukan Elite RPKAD (Anwar, 1982). Isi dari Tritura itu adalah:

1. Bubarkan PKI
2. Rombak Kabinet Dwikora
3. Turunkan Harga.

Selama lebaran aksi demonstrasi mahasiswa berhenti namun para pimpinan KAMI sering kali berkunjung kepada Menteri untuk berdiskusi termasuk mengunjungi Menteri PTIP Sjarif Thayeb. Sjarif Thayeb sendiri memberikan instruksi untuk mahasiswa kembali berkuliah mulai dari 1 Februari. Hasil dari pertimbangan usulan tersebut maka KAMI mengikuti instruksi itu (Maxwell, 2001, hlm. 194). Selain mengintruksikan untuk kembali

berkuliah Presidium KAMI juga memberikan intruksi kepada anggotanya agar tetap waspada, siaga, pertinggi kedisiplinan dan jangan samapi terprovokasi dan desas-desus yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan para pimpinan KAMI mengenai kembali berkuliah sendiri tidak dapat diterima sepenuhnya oleh mahasiswa, maka terjadilah diskusi yang alot diantara para mahasiswa sendiri untuk membahas hal itu. Dalam diskusi tersebut KAMI Bandung bersikap untuk menolak untuk melakukan mogok kuliah dan akhirnya mahasiswa-mahasiswa Jakarta sepakat dengan sikap KAMI Bandung. Intruksi tersebut disampaikan dalam rapat antara KAMI dengan Menteri PTIP Sjarif Thayeb yang berlangsung di Universitas Kristen Indonesia yang berlangsung pada 8 Februari.

Setelah Soeharto mengambil alih pimpinan negara kabinet berganti dan Sajrif Thajeb tidak terpilih kembali menjadi Menteri PTIP, namun Sjarif Thayeb mendapatkan jabatan baru dalam pemerintahan sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mewakili Sekber Golkar. Sjarif Thayeb sebelumnya merupakan calon tunggal untuk menduduki jabatan ketua DPR-GR, namun ada instruksi dari Soeharto agar jabatan tersebut diserahkan kepada orang lain dan terpilihlah Sjaichu sebagai ketua. Maka terbentuklah susunan pimpinan DPR-GR yang terdiri dari : Ketua H.A. Sjaichu dari Golongan Islam dan wakil ketua terdiri dari : Drs. Ben Mang Reng Say dari golongan Kristen atau Khatolik, Laksamana Muda Mursalin Daeng Mamanggung dan Brigadir Jendral Dr. Sjarif Thayeb dari Golongan Karya yang diangkat pada 12 Mei 1966 (Robiyani, 2017, hlm 126). Setelah selesai menjabat wakil ketua DPR-GR Sjarif Thayeb mendapat tugas menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Brazil yang berkedudukan di Washington. Pada tanggal 6 Januari 1974 Sjarif Thayeb dipanggil ke Indonesia oleh Presiden Soeharto dan diberi tugas sebagai Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan untuk menggantikan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro yang meninggal pada 1973 (Team Dokumentasi Presiden RI, 2009, hlm. 696).

Sebelum Syarif Thayeb menjabat sebagai Menteri P & K terjadilah peristiwa besar di Indonesia yaitu Malari. Dalam peristiwa tersebut mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak kedatangan perdana Menteri Jepang dan dalam aksi tersebut terjadilah kerusuhan yang cukup besar. Akibat dari aksi mahasiswa tersebut maka sehari setelah peristiwa Malari seluruh Perguruan Tinggi ditutup dan pada 1 februari 1974 dibuka kembali. Dalam menyikapi peristiwa Malari tersebut Syarif Thayeb yang baru diangkat menjadi Menteri P dan K melakukan rapat kilat bersama seluruh rektor- rektor universitas atau institut se-Indonesia dan menghasilkan keputusan yang tertuang pada SK Menteri P dan K No. 028/U/1974 Tentang Petunjuk-petunjuk Kebijaksanaan Dalam Rangka Pembinaan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi yang mulai berlaku pada 3 Februari 1974 (Kompas, 4 Februari 1974, hlm. 1). Pandangan Menteri Syarif Thayeb terhadap isi dari SK Menteri P dan K No. 028/U/1974 yaitu memisahkan kebebasan mimbar dan mimbar akademik. Apa yang dibahas didalam kampus yang boleh mengenai akademis dan dilarang membahas mengenai politik. Rektor bertanggung jawab untuk memutuskan bahwa kebebasan mimbar itu dilanggar atau tidak dan rektorlah yang memberikan izin atau tidaknya semua kegiatan mahasiswa (Jalinus dan Komar, 1978).

Dalam Surat Keputusan tersebut segala aktivitas mahasiswa didalam kampus harus mendapatkan izin, pers mahasiswa harus diawasi oleh Menteri Penerangan dan birokrat kampus, dan peraturan yang mengharuskan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai untuk bergabung menjadi satu organisasi yang di atur oleh pemerintah. Para pimpinan perguruan tinggi harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan mahasiswa di dalam kampus, hingga rencana

kerja organisasi harus diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi. Kegiatan politis seperti demonstrasi dan pawai dilarang (Rizkinuriza, 2016).

Terdapat kebijakan lain yang semakin membuat mahasiswa sibuk dengan kegiatan kampus dan menjauhkan mahasiswa pada politik yaitu mengenai pelaksanaan pembinaan generasi muda yang merupakan kebijakan hasil kerjasama tiga Menteri yaitu Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Selain keluarnya SK Menteri P dan K No. 028/U/1974 pemerintah orde baru melakukan upaya lain untuk meredam aksi mahasiswa yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap pimpinan mahasiswa dan tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintah diantaranya adalah Hariman Siregar, Prof, Sarbini Sumawinata, Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Princen. Pemerintah juga melakukan upaya pembredelan terhadap beberapa media massa yaitu Harian Nusantara, Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi, Pedomon, Suluh Berita, dan Mahasiswa Indonesia.

Keluarnya SK Menteri P dan K No. 028/U/1974 mendapat penolakan dari mahasiswa salah satunya adanya tuntutan dari Dewan Mahasiswa se-Kota Bandung yang mendatangi ketua DPR/MPR Idham Chalid. Dalam pertemuan tersebut Hatta Albanik selaku Sekjen DM se Kota Bandung meminta agar DPR mendesak Menteri P dan K mencabut SK Menteri tersebut. Syarif Thayeb merespon pertemuan tersebut dengan datang ke Bandung dan meminta Rektor Universitas Padjadjaran agar Hatta Albanik menemuinya. Mahasiswa juga memprotes kebijakan Menteri Syarif Thayeb yang mengatakan bahwa para mahasiswa bila ingin berkegiatan diluar kampus baik dalam berpolitik atau kegiatan lainnya harus dibawah naungan KNPI (Kompas, 19 Juli 1974). Syarif Thayeb menyatakan bahwa KNPI merupakan satu-satunya wadah, maka ormas- ormas mahasiswa dalam hal ini organisasi ekstrakampus diharuskan bubar.

Pada tahun 1977 gerakan mahasiswa kembali muncul walaupun tahun sebelum-sebelumnya masih terdapat protes-protes mahasiswa terkait SK Menteri P dan K No. 028/U/1974, namun protes tersebut tidak terlalu besar dikarenakan mahasiswa disibukan dengan kegiatan akademik salah satunya Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pemerintah yang sudah mencium munculnya gerakan maka pemerintah mencoba mendekati mahasiswa dengan cara mengadakan dialog yang dilakukan oleh Tim Dialog Pemerintah bentukan pemerintah (Kompas, 25 Juli 1977). Tim dialog ini diinstruksikan oleh presiden untuk menyampaikan mengenai perkembangan ekonomi yang telah dicapai selama Pelita I dan Pelita II serta menjelaskan hal-hal yang akan dicapai oleh Pelita-Pelita berikutnya. Dalam dialog disalah satu universitas Syarif Thayeb dan Soemitro meminta untuk mahasiswa mengkaji dan banyak berdialog dengan pemerintah. Tim Dialog Pemerintah ini beranggotakan tujuh orang Menteri yaitu: Menteri Riset Prof. Dr. Soemitro Djoyohadikusumo, Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim, Menteri Pertambangan Prof. Dr. Sadali, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Prof. Dr. Sumarlin, Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Keuangan Prof. Dr. Ali Wardana, dan Menteri P dan K dr. Syarif Thayeb (Culla, 1999, hlm. 100). Namun agenda pemerintah tersebut tidak berhasil karena mahasiswa di beberapa kampus besar menolak kedatangan tim dialog ini dikampusnya.

Pada 27 Desember 1977 para mahasiswa Bandung kembali turun ke jalan dengan jumlah massa sekitar ratusan orang. Para mahasiswa mendatangi gedung DPRD Jawa Barat yang sehari sebelumnya memutuskan mengusulkan Soeharto dipilih kembali menjadi Presiden. Di depan gedung DPRD Jawa Barat mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap yang berjudul "Mahasiswa Menggugat". Setelah aksi usai pasukan Kodam Siliwangi menangkap tiga

pimpinan Dewan Mahasiswa untuk dimintai keterangan bahkan adanya yang mendekam di tahanan beberapa hari (Rizkinuriza, 2016, hlm. 3). Menanggapi aksi mahasiswa Presiden Soeharto yang didampingi Menteri Syarif Thayeb melakukan pertemuan dengan para Rektor perguruan tinggi di Jawa. Syarif Thayeb menjelaskan bahwa presiden menganggap bahwa kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut wajar terjadi, namun presiden mengharapkan kegiatan-kegiatan mahasiswa ini tidak ditanggapi pihak ketiga (Abdullah dkk, 2012).

Akibat dari maraknya aksi mahasiswa pemerintah mengambil tindakan dengan membubarkan Dewan Mahasiswa dan menangkap para mahasiswa oleh Pangkoptib yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Soeharto. Pembubaran Dewan Mahasiswa sendiri oleh Menteri Syarif Thayeb yang sebelumnya Dewan Mahasiswa dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Pangkoptib Nomor SKEP-02/KOPKAM/I/1978 yang ditanda tangani oleh Laksamana Sudomo (Abdullah dkk, 2012, hlm. 371). Militer semakin aktif untuk menumpas gerakan mahasiswa selain dengan cara membubarkan Dewan Mahasiswa dan penangkapan terhadap mahasiswa-mahasiswa, militer melakukan tindakan dengan menyerbu dan menduduki kampus. ITB merupakan salah satu contoh kampus yang diduduki oleh pasukan Siliwangi dan Kostrad dengan membawa 12 satuan setingkat kompi (Kompas, 14 Februari 1978, hlm. 1). Tindakan yang dilakukan oleh militer tersebut merujuk pada pendapat dari Presiden Soeharto yang mengatakan bahwa berbagai bentuk kritik yang disampaikan oleh mahasiswa haruslah dilandasi dengan data yang benar, sebab apabila tidak ada landasan yang jelas bisa membahayakan kehidupan bangsa dan merusak konstitusi. Kebijakan represif dari pemerintah tersebut dilanjurkan oleh kebijakan Menteri P dan K Daed Joesoef dengan NKK/BKK (Usman, 1999).

SIMPULAN

Syarif Thayeb mendapatkan tugas sebagai Menteri PTIP pada masa Orde Lama (1964-1966) dan Menteri P & K pada masa Orde Baru (1974-1978). Kedua jabatan tersebut membidangi perihal mahasiswa dan terjadi peristiwa gerakan mahasiswa yang besar saat Syarif Thayeb menjabat.

Saat menjabat sebagai Menteri PTIP terjadilah peristiwa gerakan mahasiswa tahun 1966. Aksi mahasiswa ini digerakan oleh organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI sendiri terbentuk atas campur tangan Syarif Thayeb yang mengumpulkan para pimpinan organisasi mahasiswa ekstrakampus yang bukan berafiliasi dengan PKI. Puncak dari aksi mahasiswa ini adalah munculnya Tri Tuntutan Rakyat atau lebih dikenal dengan nama TRITURA. Tuntutan tersebut adalah hasil buah pikir mahasiswa yang menginginkan perubahan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik. Walaupun Presiden Soekarno menolak aksi dan tuntutan mahasiswa tersebut tidak membuat mahasiswa gentar dan meneruskan aksi tersebut. Puncak dari aksi mahasiswa tahun 1966 ini adalah peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Pada masa Orde Baru ini Syarif Thayeb kembali dipanggil ke Indonesia oleh Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri P & K dan mendapatkan tugas menghadapi mahasiswa yang telah membuat keributan dalam peristiwa Malari. Penunjukan Syarif Thayeb pada awalnya disambut gembira oleh mahasiswa, namun berbanding terbalik saat Syarif Thayeb mengeluarkan SK Menteri P dan K No. 028/U/1974 yang isinya membatasi gerak mahasiswa. Kebijakan tersebut ditanggapi oleh mahasiswa dengan cara berdemonstrasi menolak surat keputusan tersebut. Usaha lain dari pemerintah untuk meredam aksi tersebut tidak berhasil, hingga akhirnya terjadilah peristiwa pendudukan kampus oleh militer dan pembubaran Dewan Mahasiswa yang dapat meredam para mahasiswa.

REFERENSI

- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan gerakan sosial (bagaimana gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107-115.
- Ahmad, & Suwirta A. (2007). *Sejarah dan pendidikan sejarah perspektif malaysia dan indonesia*. Historia Utama Press.
- Aly, R. (2004). *Menyilang Jalan kekuasaan militer otoriter-gerakan kritis mahasiswa bandung di panggung politik indonesia 1970-1975*. Jakarta: Kompas.
- Cholis, N. (2011). NKK/BKK, tongak depolitisasi mahasiswa indonesia. *Referensi*, 2(4), hlm. 27-36.
- Danasuparta & Djumhur, I. (1976). *Sejarah pendidikan*. Bandung: CV IlmuS.
- Darmawan, W., & Mulyana, A. (2019). A History and ideology in the development of the writing of history textbooks for high school in indonesia 1994-2013. *HISTORIA*, 3(1), 1-10.
- Farawita, F. (2018). Degradasi ekologi dan kapitalisme revolusi hijau dalam buku teks sejarah SMA. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 1(2).
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Maman, M. S. (2018). Identitas nasional dalam buku teks pelajaran sejarah sma. *HISTORIA: Jurnal Pen-didik dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 97-104.
- Muslim, M. (2020). Implementasi Pembelajaran tokoh sejarah pergerakan nasional di sekolah menengah dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan patriotisme. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Se-jarah*, 4(1), 55-66.
- Naredi, H. (2019). PSPB dan dekonstruksi sejarah indonesia pada masa orde baru. *Historia: Jurnal Pen-didik dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 33-42.
- Raillon, F. (1985). *Politik dan idelogi mahasiswa indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklef, M.C. (2008). *Sejarah indonesia modern 1200-2008*. Serambi.

- Saidi, R. (1986). *Mahasiswa dan lingkaran politik*. Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia.
- Septiana, M.M. (2016). Kebijakan pendidikan menteri syarif thayeb tahun 1974-1978. *Risalah*. 3(12), 3-12.
- Sitompul, A. (2008). *Pemikiran HMI dan relevansinya dengan sejarah perjuangan bangsa indonesia*. Jakarta: Misaka Galiza.
- Sitompul, A. (2007). *Usaha-usaha mendirikan negara islam dan pelaksanaan syariat islam di indonesia*. Jakarta: Misaka Galiza.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Yogtakarta: Ombak.